

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan yang semakin meningkat menjadi bagian dari tujuan sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi ciri dari kemajuan bangsa. Oleh karenanya, adanya pertumbuhan ekonomi memungkinkan penyediaan barang dan jasa lebih banyak untuk dikonsumsi masyarakat (Purnamasari, 2018). Menjadi salah satu dari bagian negara berkembang, Indonesia tengah giat-giatnya meningkatkan pertumbuhannya dan menyadari akan pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan serta mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. Keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari tingginya produksi barang dan jasa untuk menyokong pertumbuhan ekonomi (Syam, 2019). Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kesenjangan pada kesejahteraan di masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya tugas pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar meningkatnya taraf hidup masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata (Maolani, 2019).

Bersumber dari Sukirno (2006) yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ialah gambaran meningkatnya kegiatan ekonomi yang dilihat dari naiknya pembuatan barang publik yang dikeluarkan oleh suatu negara pada waktu tertentu (Shafira, 2018). Dalam hal menunjang kemajuan dari pertumbuhan ekonomi sebuah

negara, peran pemerintah sangatlah penting dimana pemerintah dapat melakukan kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pengeluaran dan pendapatan untuk meningkatkan lapangan kerja yang tinggi tanpa adanya inflasi. Dengan adanya peran pemerintah dalam kebijakan fiskal hal tersebut ditargetkan dapat menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan, distribusi pendapatan dan pengangguran. Terdapat tiga tujuan yang berbeda dalam peran pemerintah melalui kebijakan fiskal, antara lain: fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan produksi barang; fungsi distribusi berkaitan dengan keselarasan pendapatan di masyarakat; dan fungsi stabilisasi difokuskan dalam menjaga agar pengangguran, harga/inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan peningkatan kegiatan pemerintah dalam melaksanakan ketiga peran diatas, maka pemerintah harus selalu mengeluarkan dana untuk menopang keberlangsungan aktivitas ketiga tujuan tersebut (Wibowo, 2014).

Sehubungan dengan berlangsungnya desentralisasi fiskal, setiap daerah diharuskan untuk mengembangkan daerahnya berdasarkan pada keahlian dan kapasitas daerah itu sendiri. Untuk itu, setiap daerah kewenangan didorong agar selalu mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki. Upaya-upaya inilah yang nantinya diinginkan agar mampu meningkatkan kembali kontribusi ekonomi bagi perekonomian wilayah. Cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonom berdasarkan kebijakan fiskal ialah melalui pengeluaran pemerintah yang ditingkatkan (Novitasari et al., 2017). Berikut data laporan perekonomian Jawa Barat 2021 mengenai laporan realisasi belanja menurut

kota yang ada di Jawa barat yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Menurut Kota di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2017-2020 (dalam ribu rupiah)

Kota	Tahun 2017	Kota	Tahun 2018	Kota	Tahun 2019	Kota	Tahun 2020
Bandung	Rp 5.541.718.107,06	Bandung	Rp 6.541.791.982,00	Bandung	Rp 6.616.198.953,30	Bandung	Rp 7.698.341.521,71
Bekasi	Rp 4.771.642.172,68	Bekasi	Rp 5.142.512.625,05	Bekasi	Rp 5.755.333.118,58	Bekasi	Rp 6.179.273.880,71
Depok	Rp 2.672.164.042,80	Depok	Rp 3.659.366.046,52	Depok	Rp 4.001.923.293,14	Depok	Rp 3.698.783.824,00
Bogor	Rp 2.246.502.610,17	Bogor	Rp 2.717.401.935,14	Bogor	Rp 2.961.659.337,79	Bogor	Rp 2.624.150.152,62
Tasikmalaya	Rp 1.854.035.647,43	Tasikmalaya	Rp 1.945.643.329,18	Tasikmalaya	Rp 2.009.798.061,37	Cirebon	Rp 1.850.546.261,93
Cirebon	Rp 1.410.143.483,36	Cimahi	Rp 1.656.270.599,55	Cirebon	Rp 1.810.629.947,11	Tasikmalaya	Rp 1.713.330.059,38
Sukabumi	Rp 1.160.219.417,02	Cirebon	Rp 1.503.054.977,90	Cimahi	Rp 1.648.100.228,68	Cimahi	Rp 1.568.476.136,33
Cimahi	Rp 1.135.980.172,52	Sukabumi	Rp 1.360.586.288,91	Sukabumi	Rp 1.403.097.152,00	Sukabumi	Rp 1.344.538.648,00
Banjar	Rp 787.655.736,35	Banjar	Rp 887.431.913,03	Banjar	Rp 1.017.745.761,93	Banjar	Rp 836.711.536,11

Sumber: Jabar.bps.go.id/ Survei Statistik Keuangan Daerah-Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan laporan realisasi belanja pada daerah kota diatas, pada tahun 2018-2020 urutan pertama ditempati oleh Kota Bandung sebesar Rp6.541.791.982,00, kemudian Rp6.616.198.953,30 dan Rp7.698.341.521,71. Diikuti oleh Kota Bekasi di urutan kedua dengan angka Rp5.142.512.625,05 untuk tahun 2018 Rp5.755.333.118,58 tahun 2019 dan Rp6.179.273.880,71 pada tahun 2020. Kemudian Kota Depok tahun 2018 sebesar Rp3.659.366.046,52, tahun 2019 sebesar Rp4.001.923.293,14 dan tahun 2020 senilai Rp3.698.783.824,00. Selanjutnya oleh Kota Bogor dengan realisasi belanja pada tahun 2018 sebesar Rp2.717.401.935,14, kemudian tahun 2019 Rp2.961.659.337,79 dan tahun 2020 Rp2.624.150.152,62. Setelah itu pada tahun 2018 dan tahun 2019 ditempati oleh Kota Tasikmalaya sebesar Rp1.945.643.329,18 dan Rp2.009.798.061,37

selanjutnya tahun 2020 ditempati oleh Kota Cirebon sebesar Rp1.850.546.261,93. Secara umum peringkat lima besar ditempati oleh kota-kota besar dan berkembang yang ada di Jawa Barat. Sementara itu, urutan terakhir pada daerah kota ditempati oleh Kota Banjar dengan realisasi belanja sebesar Rp 887.431.913,03 untuk tahun 2018 kemudian Rp 1.017.745.761,93 tahun 2019 dan Rp 836.711.536,11 tahun 2020.

Seperti yang dilansir dari situs jabarprov.go.id Kota Banjar termasuk dalam daerah dengan potensi yang baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi sekitarnya. Sejak diresmikannya pada Februari 2002, Kota Banjar menjadi daerah jalur lalu lintas yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan potensi industri, perdagangan, pariwisata dan jasa serta mampu membangun daerahnya menjadi lebih baik. Faktor terpenting dalam pembangunan daerah ialah pertumbuhan ekonomi yang diamati dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase PDRB sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian suatu daerah. Oleh karenanya, dalam memperoleh daerah dengan angka pertumbuhan yang baik didapat dari persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Soleh & Anitasari, 2015). Menurut laporan dari badan pusat statistik Kota Banjar, nilai perekonomian Kota Banjar menjadi salah satu yang terkecil di Jawa Barat. Data PDRB Kota Banjar dapat ditinjau pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan Usaha di Kota Banjar tahun 2011-2020 (Juta rupiah)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	5,47
2012	5,32
2013	5,45
2014	4,98
2015	5,32
2016	5,86
2017	5,30
2018	5,05
2019	5,03
2020	0,94

Sumber: banjarkota.bps.go.id

Sehubungan tabel 1.2 diatas pertumbuhan ekonomi Kota Banjar dari tahun 2011 sampai taun 2020 mengalami naik turun. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi peyumbang terbesar dimana hal tersebut masih menjadi ciri dari Kota Banjar. Persentase PDRB Kota Banjar mengalami naik turun dari tahun 2011-20215. Selebihnya selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 persentase pertumbuhan ekonomi Kota Banjar cenderung menurun. Dimana pada tahun 2016 PDRB mencapai angka 5,86% menjadi angka tertinggi selama 10 tahun. Kemudian tahun 2017 menurun menjadi 5,30%. Lalu tahun 2018 kembali menurun dengan angka 5,05% kemudian pada tahun 2019 sebesar 5,03% dan pada tahun 2020 mengalami kelambatan dan penurunan yang cukup signifikan karena dampak adanya Covid-10 yakni menjadi 0,94%. Dampak negatif dari adanya Covid-19 sangat terasa bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar yang

mengalami perlambatan serta berdampak pada sektor-sektor usaha apalagi usaha kecil dan menengah. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Banjar, Aep Saepul Hijbi pada harapanrakyat.com bahwasanya:

“Tentu kami prihatin dengan meningkatnya kasus positif covid-19. Karena dampaknya pasti akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang jelas lonjakan kasus positif tersebut pasti akan ada dampaknya bagi sektor ekonomi pelaku usaha.”

Menurut Keynes, langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal yaitu *expenditure approach* (melalui pengeluaran) (Anggraeni, 2017). Sebuah pengeluaran pemerintah daerah tercantum pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin dari jumlah keseluruhan belanja daerah (Soleh & Anitasari, 2015). Dalam UU No.17 tahun 2003 pasal 1 butir 8, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Sementara itu, Ilyas (1989:) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh pengeluaran dalam penyelenggaraan aktivitas guna mensejahterakan seluruh masyarakat (Anggraeni, 2017). Maka dari itu sebuah pertumbuhan ekonomi dapat disokong oleh pengeluaran pemerintah yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian (Shafira, 2018). Pertumbuhan ekonomi setiap tahun mencerminkan kemajuan perekonomian suatu negara dan hal tersebut dapat diamati dari besar kecilnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Wahyudi, 2020). Anggaran pengeluaran dan belanja daerah menurut Suminto

(2004) bukan hanya sebagai alat pemerintah dalam mensejahterakan rakyat tetapi juga sebagai alat yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menjalankan perekonomian daerah (Anugra et al., 2016).

Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kaitannya secara langsung dengan kegiatan ataupun program pemerintah dalam pembangunan adalah belanja langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Imawan, 2018). Belanja modal atau belanja infrastruktur merupakan belanja yang menjadi komponen utama dalam pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Investor.id, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa sangat penting untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah daerah dengan cara membatasi belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal atau infrastruktur dalam APBD. Seperti halnya yang dipaparkan oleh menteri keuangan, Sri Mulyani bahwasanya dalam UU HKPD diatur bahwa untuk belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Sementara itu, pada pasal 147 ayat 1 UU HKPD mengatur bahwa belanja modal atau belanja infrastruktur untuk pelayanan publik dengan minimal 40% dari APBD. Beliau memaparkan:

“Kami memang impose dalam undang-undang ini ada cap maksimum belanja pegawai 30% dan belanja modal harus mendekati 40%, namun ini akan dilakukan secara bertahap.”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Keynes bahwa strategi perekonomian salah satunya dengan pemerintah menaikkan pengeluarannya (Kusriyawanto, 2014). Menurut data belanja daerah, belanja modal dari tiap daerah

setiap tahunnya masih memiliki nilai yang lebih kecil dibanding belanja barang dan jasa. Bagi daerah yang tidak mematuhi hal terkait akan diberikan sanksi yaitu penundaan dari DAU ataupun DBH sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri keuangan Nomor 139/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Kota Banjar sendiri menjadi kota baru yang masih melakukan transisi untuk hal tersebut. Adapun realisasi belanja daerah Kota Banjar dapat dilihat pada data dibawah ini:

Tabel 1.3

Laporan Realisasi Belanja Daerah Kota Banjar Menurut Klasifikasi Ekonomi
(Jenis Belanja) Tahun 2011-2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Realisasi			Persentase (%)		
	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
2011	Rp29.131.285.227	Rp70.694.773.202	Rp151.418.340.703	12%	28%	60%
2012	Rp32.535.560.566	Rp85.795.839.618	Rp148.623.923.071	12%	32%	56%
2013	Rp45.157.001.753	Rp97.222.860.802	Rp221.351.044.402	12%	27%	61%
2014	Rp70.965.012.091	Rp119.095.488.293	Rp150.062.123.762	21%	35%	44%
2015	Rp70.564.688.297	Rp130.638.524.369	Rp194.774.353.115	18%	33%	49%
2016	Rp27.887.505.000	Rp178.703.455.497	Rp281.994.343.093	6%	37%	58%
2017	Rp28.128.231.350	Rp178.425.281.604	Rp215.242.342.160	7%	42%	51%
2018	Rp28.618.672.250	Rp206.959.584.630	Rp193.782.528.970	7%	48%	45%
2019	Rp40.455.740.912	Rp239.671.040.333	Rp208.991.724.826	8%	49%	43%
2020	Rp40.043.409.701	Rp231.727.804.164	Rp57.422.540.258	12%	70%	17%

Sumber: peraturan.bpk.go.id-banjarkota.bps.go.id

Berdasarkan Tabel diatas belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi di Kota Banjar pada taun 2011 sampai taun 2020 mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2011 sampai tahun 2015 kategori belanja pegawai dan belanja barang jasa mengalami kenaikan sedangkan untuk belanja modal sendiri mengalami penurunan

dari tahun 2012 ke tahun 2013. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai tahun 2018 belanja pegawai mengalami kenaikan kembali sampai tahun 2017 kemudian belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sampai tahun 2017 dan naik kembali pada tahun 2018. Berbeda dengan belanja modal yang mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 belanja pegawai yang sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2018 naik kembali sedangkan belanja barang dan jasa serta belanja modal mengalami naik turun dari tahun tersebut. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 belanja pegawai mencapai angka Rp35.438.344.330 dan Rp33.754.374.533. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp222.929.737.700 di tahun 2019 dan Rp211.350.148.271 di tahun 2020. Sedangkan untuk belanja modal mengalami kenaikan yaitu dari Rp193.782.528.970 di tahun 2018 menjadi Rp208.991.724.826 pada tahun 2019 dan menurun menjadi Rp57.422.540.258 di tahun 2020.

Pada tahun 2020 terjadi ketimpangan yang signifikan dimana belanja barang jasa hampir mencapai keseluruhan dari total belanja dengan angka 70% sedangkan belanja modal 17%. Kecilnya realisasi belanja modal dibanding belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan kementerian keuangan di atas. Dimana belanja modal menjadi komponen yang penting guna mendorong perekonomian daerah. Belanja modal menjadi pengeluaran yang utama dalam pelaksanaan infrastruktur daerah yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dan menunjang perekonomian. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan latar permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, peneliti ingin mengangkat judul **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Banjar Tahun 2011-2020"**.

1.1 Identifikasi Masalah

Melihat pada penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat ditarik ialah sebagai berikut:

1. Kota Banjar yang berada di urutan terakhir berdasarkan laporan realisasi pengeluaran pemerintah provinsi menurut Kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2020.
2. Perekonomian Kota Banjar yang dilihat dari laporan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha yang masih terbilang kecil dan berfluktuasi.
3. Kecilnya angka realisasi belanja modal di Kota Banjar dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan kementerian keuangan dan UU HKPD.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020?

2. Seberapa besar pengaruh belanja pegawai secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020?
3. Seberapa besar pengaruh belanja barang dan jasa secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020?
4. Seberapa besar pengaruh belanja modal secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh dari pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari belanja pegawai secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari belanja barang dan jasa secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari belanja modal secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pustaka karya ilmiah dan dapat dijadikan sebagai pengembangan teori bagi para peneliti selanjutnya serta menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan acuan referensi pada prodi Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang pengeluaran pemerintah dalam belanja langsung pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal kemudian dapat memberikan kontribusi pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi baik dengan melalui pengeluaran pemerintah secara tepat guna. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referens bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan pengeluaran pemerintah pada belanja pegawai, belanja belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam pertumbuhan ekonom.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana variabel bebasnya pengeluaran pemerintah (X) dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Pengeluaran pemerintah/*government expenditure* merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yaaitu sebagai suatu perbuatan pemerntah dalam menata perekonomian negara/wilayah melalui penetapan angka penerimaan dan

pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam APBN/APBD. Kebijakan fiskal sendiri bertujuan untuk salah satunya mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut Prasetya dalam (Prasetya, 2012) disebutkan bahwa pengeluaran pemerintah terdiri atas tiga komponen utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji/upah pegawai
- 3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment (bantuan masyarakat, pinjaman pemerintah kepada masyarakat, pensiunan dan lainnya)

Melihat pada pendapat diatas, maka pengeluaran pemerintah atau belanja daerah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berdasar pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah menurut klasifikasi belanja terbagi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Hal tersebut juga berdasar dalam pengaturan ulang ketentuan alokasi belanja daerah Undang-undang Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan daerah (HKPD) bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan belanja terkhusus belanja modal dalam rangka meningkatkan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik guna mendorong roda perekonomian daerah. Menurut Juanda et al. (2013) Kualitas belanja daerah terdiri dari beberapa indikator didalamnya yaitu prioritas belanja, alokasi belanja, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas, dan efektivitas belanja.

Sebagaimana Rostow mengemukakan dalam teorinya mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Dimana Rostow menghubungkan

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan dari pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, investasi atau modal pemerintah menjadi nilai keseluruhan karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada publik diantaranya kesehatan, pendidikan, kemudian transportasi. Selanjutnya pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi dari swasta sudah mulai berkontribusi besar akan tetapi investasi dari pemerintah juga tetap dibutuhkan. Sementara itu, pada tahap lanjut kegiatan pemerintah sepeuhnya beralih dari yang sebelumnya penyedia prasarana menjadi ke pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti jaminan sejahtera hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah yang terstruktur kepada setiap bagian dapat meningkatkan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan dan lapangan usaha, maka hal tersebut akan mampu menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB dapat menjadi cerminan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah, apakah masih minimum atau bahkan mampu mencapai angka yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Keynes menjadi teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Keynes berpendapat yang dikenal dengan teori Keynes bahwasanya “perekonomian akan berkembang baik jika pemerintah menaikkan pengeluarannya”. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah membutuhkan pengeluaran

untuk membiayai setiap program atau kegiatannya dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai bentuk investasi/modal pemerintah dalam menunjang pendapatan nasional kedepannya.

Subandi mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses meningkatnya jumlah produksi dalam perekonomian secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang akan menghasilkan kenaikan pendapatan dan output setiap tahun. Subandi mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

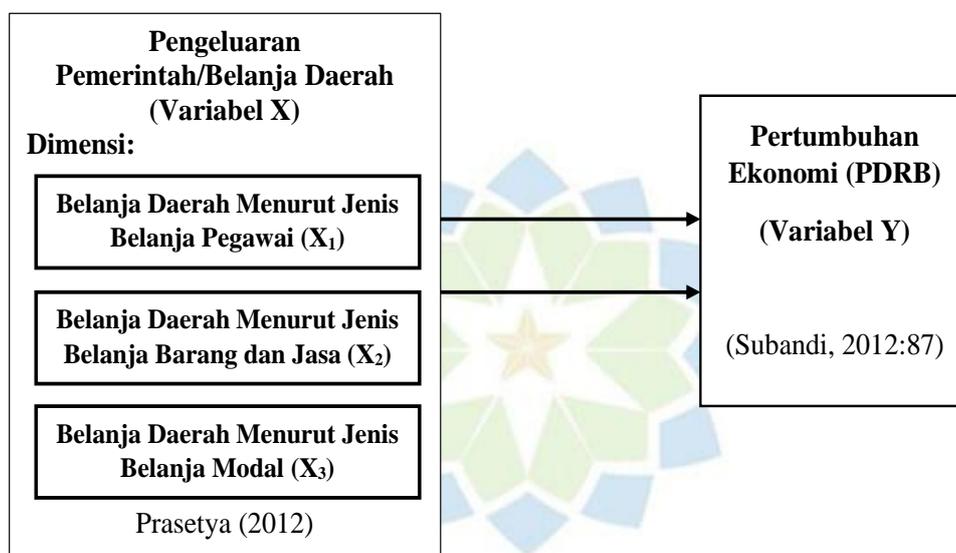
1. Akumulasi Modal, yang meliputi semua investasi dalam perekonomian baik sektor produktif (pabrik, mesin, peralatan dan lainnya) yang dapat menambah stok modal, kemudian sektor infrastruktur sosial dan ekonomi (jalan raya, listrik, air, komunikasi dan sebagainya) yang akan memudahkan integrasi kegiatan ekonom, dan investasi atau modal insani (*Human resource*) seperti sekolah, pembinaan, program pelatihan kerja, pendidikan informal; dan sebagainya.
2. Pertumbuhan Penduduk yang dalam tahap selanjutnya akan menambah angkatan kerja untuk meningkatkan pendapatan.
3. Kemajuan Teknologi yang berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan nantinya menyebabkan ekonomi dan industri meningkat guna menaikkan produktivitas kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tentang pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ini turunan variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah yang digunakan oleh peneliti sebagai variabel yang

memberikan pengaruh pada variabel terikat adalah belanja pegawai (X_1), belanja barang dan jasa (X_2) serta belanja modal (X_3). Maka kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Dari gambar 1.1 diatas, dapat disebutkan bahwa peneliti akan melakukan penelitian dengan judul pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasan utama peneliti memilih variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal karena melihat pada pendapat Prasetya tentang tiga bidang utama dalam perkembangan pemerintah yang didasarkan pada UU HKPD mengenai peningkatan belanja modal serta Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dimana belanja tersebut merupakan bagian instrumen pengeluaran yang berkaitan langsung dengan setiap kegiatan dan program pemerintah. Alasan lain karena melihat dari kementerian keuangan kementerian memimta meningkatkan belanja modal dan bahwa belanja modal

merupakan salah satu belanja yang dapat meningkatkan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik guna mendorong perekonomian suatu daerah terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar.

